**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

# KETIMPANGAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN INKLUSIF DI DAERAH TERPENCIL KABUPATEN KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

**Naviana Lasviani Mamu[1], Yakup Ole Ate[2], Aresto Nge[3], Kaisar Y. J. L. Laot Bahy[4], Marselina Kause[5], Lasarus Jehamat[6]**

[123456] Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available Januari, 2026

navianalasvianimamu@gmail.com,
yakubatte@gmail.com,
ngearesto@gmail.com,
kaiseryoseph@gmail.com,
marselinakause39@gmail.com,
lasarusjehamat@staf.undana.ac.id

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan akses dan kualitas pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan menyoroti faktor geografis, sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur dan transportasi, rendahnya kualitas serta distribusi guru, dan minimnya sarana pembelajaran menjadi faktor utama penghambat pemerataan pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat terbukti berperan penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, namun masih memerlukan penguatan kebijakan dan fasilitasi pemerintah. Selain itu, ketimpangan gender masih membatasi akses pendidikan anak perempuan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal, kolaborasi pemerintah dan masyarakat, serta pendekatan yang responsif gender untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** pendidikan inklusif, ketimpangan pendidikan, daerah terpencil, Kabupaten Kupang.

***A B S T R A C T***

*This study aims to analyze disparities in access to and quality of inclusive education in Kupang Regency, East Nusa Tenggara, focusing on geographical, socio-economic, community participation, and gender equality factors. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that difficult geographical conditions, limited educational infrastructure and transportation, uneven teacher distribution and quality, and inadequate learning facilities are the main barriers to inclusive education. Community participation plays a crucial role in supporting educational sustainability but still requires stronger policy support and facilitation from the government. Gender disparities also remain a significant challenge, particularly for girls in remote areas. This study concludes that inclusive education in Kupang Regency requires context-sensitive policies, strong government-community collaboration, and gender-responsive approaches to achieve equitable and sustainable education.*

***Keywords**: inclusive education, educational inequality, remote areas, Kupang Regency.*

*Corresponding author
E-mail addresses: navianalasvianimamu@gmail.com

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat global, pendidikan inklusif diakui sebagai strategi utama untuk mengurangi ketimpangan sosial, mendorong pemerataan kesempatan, dan membangun kapasitas individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, dalam konteks daerah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi, implementasi pendidikan inklusif sering menghadapi hambatan signifikan yang berdampak pada kualitas dan akses pendidikan. Hal ini tercermin di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana disparitas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi masalah serius.

Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan kompleks dalam penyediaan pendidikan inklusif. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang tersebar, infrastruktur pendidikan yang terbatas, dan ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan, sehingga akses ke pendidikan berkualitas seringkali tidak merata. Fenomena ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di beberapa daerah terpencil, kualitas guru yang bervariasi, serta keterbatasan fasilitas sekolah yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan risiko tertinggalnya generasi muda dalam memperoleh kompetensi dasar yang penting bagi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan adalah melalui kebijakan penegerian satuan pendidikan keagamaan Kristen. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak di daerah tertinggal, sekaligus mengurangi ketimpangan akses pendidikan (Henukh, 2025). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, hingga distribusi guru dan fasilitas yang belum merata. Tantangan ini menunjukkan perlunya strategi pendidikan yang tidak hanya berbasis kebijakan formal, tetapi juga memperhitungkan kondisi lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain akses, kualitas pendidikan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pendidikan inklusif. Pendidikan berkualitas memerlukan dukungan guru yang kompeten, kurikulum yang relevan, sarana prasarana yang memadai, serta partisipasi orang tua dan komunitas. Penelitian Kamalia dan Nawangsih (2025) menunjukkan adanya kesenjangan ketuntasan pendidikan yang mencolok di berbagai daerah di Indonesia, termasuk NTT, sehingga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Disparitas ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan akademik siswa, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang, termasuk peningkatan kemiskinan dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pembangunan (Chika et al., 2025).

Selain itu, fenomena ketidaksetaraan generasi akibat akses pendidikan yang terbatas memunculkan kebutuhan mendesak akan pendidikan inklusif yang dapat menjangkau semua kelompok, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan mereka yang berada di wilayah terpencil. Inisiatif pemberdayaan masyarakat, sosialisasi literasi, dan peningkatan kualitas guru menjadi langkah strategis yang dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang NTT, oleh karena itu, bukan hanya persoalan teknis penyediaan sekolah, tetapi juga mencerminkan kompleksitas interaksi antara kebijakan, kondisi ekonomi, budaya, dan partisipasi masyarakat dalam membangun kesempatan pendidikan yang setara.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses dan kualitas pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang di NTT, menyoroti tantangan di daerah terpencil, serta mengeksplorasi strategi yang dapat meningkatkan pemerataan pendidikan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pendekatan ini diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan inklusif dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah yang selama ini tertinggal.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam ketimpangan akses dan kualitas pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri proses, pengalaman, serta persepsi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sementara desain studi kasus memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap konteks lokal, interaksi sosial, dan dinamika implementasi kebijakan pendidikan di wilayah penelitian.

Penelitian dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang yang tergolong daerah terpencil dan menghadapi tantangan signifikan dalam hal akses serta kualitas pendidikan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan indikator geografis, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan ketersediaan fasilitas pendidikan, sehingga lokasi penelitian dinilai mampu merepresentasikan kondisi riil pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang secara lebih utuh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Wawancara mendalam dilakukan dengan guru, kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, aparat pendidikan daerah, serta perwakilan lembaga non-pemerintah untuk menggali pengalaman, kendala, dan strategi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung proses belajar-mengajar, kondisi sarana prasarana sekolah, interaksi antara guru dan siswa, serta praktik implementasi kebijakan pendidikan inklusif di kelas maupun lingkungan sekolah. Selain itu, dokumentasi berupa kebijakan pemerintah daerah, laporan sekolah, data statistik pendidikan, dan catatan program pendidikan inklusif dianalisis sebagai bahan triangulasi dan validasi temuan penelitian.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait pendidikan inklusif. Partisipan meliputi guru dan kepala sekolah yang terlibat langsung dalam program pendidikan inklusif, orang tua siswa yang tinggal di daerah terpencil, serta tokoh masyarakat dan aparat pendidikan yang memahami kondisi akses dan kualitas pendidikan di wilayah penelitian. Pemilihan partisipan dari berbagai latar belakang ini dimaksudkan untuk merepresentasikan beragam perspektif, baik dari sisi penyelenggara maupun penerima layanan pendidikan, sehingga kompleksitas ketimpangan pendidikan dapat dianalisis secara lebih holistik.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang diawali dengan proses transkripsi hasil wawancara dan catatan observasi. Selanjutnya dilakukan pengkodean awal untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait ketimpangan akses dan kualitas pendidikan inklusif, yang kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih luas, seperti kendala geografis, kualitas dan ketersediaan guru, partisipasi masyarakat, serta implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Tahap akhir analisis dilakukan dengan mengembangkan interpretasi tematik yang mengaitkan temuan empiris dengan literatur dan konsep terkait pendidikan inklusif dan ketimpangan pendidikan. Triangulasi antar-teknik pengumpulan data diterapkan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai ketimpangan akses dan kualitas pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang.

*Corresponding author
E-mail addresses: navianalasvianimamu@gmail.com

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kabupaten Kupang, ketimpangan akses terhadap pendidikan inklusif merupakan persoalan struktural yang kompleks dan bersifat multidimensional, yang dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah. Karakteristik geografis Kabupaten Kupang yang didominasi oleh wilayah perbukitan, jarak antardesa yang berjauhan, serta keterbatasan infrastruktur transportasi menyebabkan akses menuju satuan pendidikan menjadi sulit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kehadiran siswa di sekolah serta meningkatnya risiko putus sekolah, khususnya pada kelompok anak dari keluarga miskin dan rentan. Pendidikan di wilayah terpencil sering kali belum mampu memenuhi prinsip pendidikan inklusif yang menjamin akses setara bagi seluruh anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, sebagaimana tercermin dari keterbatasan fasilitas fisik, sarana pendukung pembelajaran, dan layanan pendampingan yang memadai. Penelitian Al-Faiza et al. (2025) menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan yang kurang layak, ditambah dengan hambatan geografis yang berat, masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil.

Selain kendala geografis, faktor sosial dan ekonomi turut memperparah ketimpangan akses pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan ekonomi keluarga, serta minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan jangka panjang menjadi faktor yang memengaruhi keputusan keluarga dalam menyekolahkan anak. Dalam banyak kasus, anak-anak terpaksa membantu orang tua bekerja di sektor informal atau pertanian subsisten, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Gunawan et al. (2023) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya kemauan, melainkan oleh keterbatasan informasi, akses, dan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Kondisi ini diperparah oleh minimnya program sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah yang secara khusus menyasar masyarakat di wilayah terpencil.

Pengalaman empiris masyarakat menunjukkan secara nyata bagaimana kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur berdampak pada akses pendidikan anak. Seorang orang tua di desa terpencil mengungkapkan bahwa anaknya harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam dengan berjalan kaki melewati jalur berbatu dan menyeberangi sungai untuk mencapai sekolah, dan pada musim hujan anak-anak sering kali tidak dapat bersekolah sama sekali karena kondisi jalan yang berbahaya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa akses pendidikan bukan sekadar persoalan ketersediaan sekolah, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan akses yang layak bagi peserta didik. Temuan ini sejalan dengan Al-Faiza et al. (2025) yang menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang sensitif terhadap konteks lokal dan realitas geografis wilayah.

Dalam konteks kebijakan, penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik daerah terpencil. Upaya seperti penegerian sekolah keagamaan dan pembangunan unit sekolah baru memang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, namun distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata menyebabkan sebagian wilayah masih tertinggal. Ama (2025) menegaskan bahwa kebijakan afirmatif yang berorientasi pada komunitas lokal, disertai dengan perencanaan berbasis data kebutuhan wilayah, menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Tanpa pendekatan yang kontekstual, kebijakan pendidikan berisiko tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

Selain persoalan akses, kualitas pendidikan di daerah terpencil Kabupaten Kupang juga menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kualitas pendidikan yang diterima

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

siswa di wilayah terpencil sering kali belum sebanding dengan standar nasional, baik dari segi kompetensi pendidik, ketersediaan bahan ajar, maupun dukungan teknologi pembelajaran. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional guru menyebabkan proses pembelajaran kurang adaptif terhadap kebutuhan siswa yang beragam, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Dewi dan Suriansyah (2025) serta Gunawan et al. (2023) mengidentifikasi bahwa rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil berkaitan erat dengan minimnya dukungan pemerintah, terbatasnya anggaran pendidikan, serta distribusi guru yang belum merata.

Seorang guru di daerah terpencil menyampaikan bahwa keterbatasan media pembelajaran, buku ajar, dan fasilitas teknologi memaksa guru untuk mengajar dengan metode yang sangat sederhana dan kurang variatif. Kondisi kelas yang padat dan jumlah guru yang terbatas membuat pemberian perhatian individual kepada siswa menjadi sulit, sehingga kebutuhan belajar anak-anak, terutama yang memiliki hambatan belajar, tidak dapat terpenuhi secara optimal. Temuan ini memperkuat argumen Dewi dan Suriansyah (2025) bahwa daerah terpencil memerlukan pendekatan kurikulum yang lebih fleksibel, kontekstual, dan inklusif, serta dukungan berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas guru.

Marziana et al. (2025) menambahkan bahwa penempatan guru dan penyediaan sumber daya pendidikan seharusnya didasarkan pada analisis kebutuhan spesifik setiap daerah, bukan semata-mata pada pertimbangan administratif. Dalam konteks ini, inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan komunitas menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indrawati et al. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti pembelajaran daring terbatas dan penggunaan media audio-visual sederhana, serta pengembangan metode pembelajaran berbasis komunitas, mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan kualitas pembelajaran di daerah terpencil. Namun demikian, keberhasilan inovasi tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan program (Ama, 2025).

Partisipasi masyarakat merupakan pilar fundamental dalam penguatan pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga memperkuat relevansi dan efektivitas program pendidikan. Heriyadi et al. (2025) serta Amin dan Nasution (2025) menegaskan bahwa pendidikan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif cenderung lebih berkelanjutan karena didukung oleh sumber daya dan komitmen lokal. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat turut membantu sekolah melalui pembentukan kelompok belajar, penyediaan fasilitas tambahan, dan pendampingan belajar bagi anak-anak, khususnya mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi aktor strategis dalam menutup celah keterbatasan yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah.

Temuan Hamilaturroyya dan Adibah (2025) mendukung pandangan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif berkontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, serta dukungan kebijakan yang memberdayakan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat memungkinkan penguatan kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya pendidikan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan (Gunawan et al., 2023; Rizki et al., 2025; Nebore et al., 2025).

Isu ketimpangan gender juga menjadi tantangan penting dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang. Anak perempuan di daerah terpencil sering kali menghadapi

*Corresponding author
E-mail addresses: navianalasvianimamu@gmail.com

hambatan ganda dalam mengakses pendidikan, baik karena faktor jarak sekolah, beban tanggung jawab domestik, maupun norma sosial budaya yang masih menempatkan pendidikan anak laki-laki sebagai prioritas utama. Seorang guru mengungkapkan bahwa banyak anak perempuan tidak dapat bersekolah secara rutin karena harus membantu pekerjaan rumah tangga atau merawat adik-adiknya. Savitri et al. (2024) menekankan bahwa tanpa pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan praktik pendidikan, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan akan terus berlanjut.

Lestari (2024) menambahkan bahwa pengembangan kurikulum yang responsif gender serta pelatihan pendidik dalam memahami isu-isu kesetaraan gender merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan integrasi perspektif gender dalam pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.

Secara keseluruhan, pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang dihadapkan pada ketimpangan multidimensi yang mencakup aspek akses, kualitas, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan gender. Faktor geografis, keterbatasan ekonomi, distribusi dan kualitas guru, serta norma sosial budaya menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, didukung oleh inovasi pembelajaran berbasis komunitas dan teknologi, memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Pendekatan kebijakan yang berbasis data, adaptif terhadap konteks lokal, serta berperspektif inklusif dan gender menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan di daerah terpencil Nusa Tenggara Timur (Al-Faiza et al., 2025; Dewi & Suriansyah, 2025; Savitri et al., 2024).

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang masih menghadapi ketimpangan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek akses, kualitas, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan gender. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta rendahnya akses transportasi menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan layanan pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Di sisi lain, kualitas pendidikan juga belum sepenuhnya memenuhi standar nasional akibat keterbatasan kompetensi dan distribusi guru, minimnya sarana prasarana pembelajaran, serta rendahnya pemanfaatan teknologi pendidikan. Partisipasi masyarakat menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung pendidikan inklusif, namun masih membutuhkan penguatan melalui dukungan kebijakan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Selain itu, ketimpangan gender masih menjadi tantangan serius, di mana anak perempuan di wilayah terpencil cenderung memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas akibat beban domestik dan norma sosial budaya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif di Kabupaten Kupang memerlukan pendekatan yang komprehensif, kontekstual, dan kolaboratif agar dapat menjamin hak pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh anak.

### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait memperkuat kebijakan pendidikan inklusif yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik lokal, khususnya melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperluas program pelatihan dan pendampingan guru, pemerataan penempatan tenaga pendidik, serta

penyediaan sarana pembelajaran yang memadai dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Selain itu, inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan komunitas perlu didorong secara berkelanjutan dengan dukungan anggaran dan regulasi yang jelas. Partisipasi masyarakat hendaknya terus diperkuat melalui mekanisme kolaboratif yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dalam perencanaan serta evaluasi pendidikan. Terakhir, pengarusutamaan gender perlu diintegrasikan secara konsisten dalam kebijakan dan praktik pendidikan, termasuk melalui kurikulum responsif gender dan peningkatan kapasitas pendidik, guna memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dan inklusif di Kabupaten Kupang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Faiza, A., Fitri, N., Tsany, A., & Aqilah, A. (2025). *Eksklusi sosial dalam pendidikan*. PJIER, 3(1), 46-59. https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198

Alim, S. and Harsono, I. (2025). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi nusa tenggara barat tahun 2015-2024*. Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6(3), 370-377. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.701

Ama, M. (2025). *Evaluating the effectiveness of village fund allocation in supporting participatory rural development and reducing poverty rates in remote areas of east nusa tenggara*. Moccasin Journal De Public Perspective, 2(3), 147-157. https://doi.org/10.37899/mjdpp.v2i3.247

Amin, M. and Nasution, A. (2025). *Mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif: studi kasus pengelolaan dana desa di kabupaten banggai*. DPMR, 1-20. https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.42293

Chika, P., Siregar, G., Sinaga, K., & Ummah, A. (2025). *Ketidaksetaraan gender dalam pembangunan perdesaan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di nusa tenggara timur pada periode kepemimpinan victor laiskodat 2018*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(2), 12. https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.258

Dewi, R. and Suriansyah, A. (2025). Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan: studi kualitatif pada sekolah di pedesaan dan perkotaan. Elementary Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, 5(1), 33-43. https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4158

Gunawan, A., Yunus, N., & Husna, F. (2023). *Contribution of government policy stakeholders in improving the quality of education in indonesia*. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I, 10(3), 961-976. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33950

Hamilaturroyya, H. and Adibah, I. (2025). *Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik*. Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(3), 1245-1259. https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631

Henukh, G. (2025). *Kebijakan penegerian satuan pendidikan keagamaan kristen di ntt: upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal*. j.ilm.gema.perenc., 4(1), 649-676. https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.224

Heriyadi, H., Rahmi, I., Sulistiawan, E., Kusmiran, A., & Suriansyah, A. (2025). Peran komunitas dalam meningkatkan mutu pendidikan di sdk santa maria. Manajerial Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, 5(2), 444-452. https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6201

Indrawati, R., Sembiring, M., & Dewi, L. (2025). *Enhancing educational innovation in underdeveloped regions: a management model for enhancing entrepreneurial competence*

*Corresponding author
E-mail addresses: navianalasvianimamu@gmail.com

*in ntt schools*. Nidhomul Haq Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(2), 542-556. https://doi.org/10.31538/ndhq.v10i2.170

Kamalia, A. and Nawangsih, I. (2025). *Identifikasi pola tingkat kesenjangan ketuntasan pendidikan di indonesia dengan menggunakan metode k-medoids clustering*. Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 12(2), 321-330. https://doi.org/10.25126/jtiik.2025129219

Lestari, S. (2024). *Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilukada di provinisi lampung*. Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 153-167. https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22439

Marziana, L., Suhardi, M., Rohmawati, W., Sakira, N., & Hidayat, A. (2025*). Strategi pemerataan tenaga pendidik di daerah terpencil: sebuah kajian literatur tentang pendekatan yang efektif*. Educational Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran, 5(2), 473-485. https://doi.org/10.51878/educational.v5i2.6291

Nebore, E., Muhibuddin, A., & Juharni, J. (2025). *Sinergitas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan desa di kecamatan teminabuan kabupaten sorong selatan*. adm, 3(1), 34-36. https://doi.org/10.35965/pja.v3i1.6026

Rizki, M., Widyawati, W., Dwijosusilo, K., & Pramudiana, I. (2025). *Peran kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa wisata silowo merakurak di tuban jawa timur*. Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, 7(2), 183-203. https://doi.org/10.37849/mici.v7i2.466

Savitri, F., Waty, E., Nurrizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T., & Marwiyanti, H. (2024). *Implementasi pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan di desa purnajaya, kecamatan indralaya utara*. jpn, 1(3). https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.363